

ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DAN KEADILAN SUMBER DAYA ALAM - WEBINAR REMBUG NASIONAL 8 JULI 2020

SUB-TEMA: PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL



Dr Sonny Zulhuda
Associate Professor
Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws
International Islamic University Malaysia

[<sonnyzulhuda.com>](http://sonnyzulhuda.com)

PEMBUKAAN REMBUG NASIONAL ANCAMAN KEBEBASAN SIPIL DAN KEADILAN SUMBER DAYA ALAM

Rembug Nasional ini merupakan bentuk partisipasi rakyat untuk menyampaikan keberpihakannya kepada kepentingan bangsa. Juga, sebagai upaya menghentikan segala gerakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat dan rasa keadilan.

Key Note Speech:

Narasumber



Penanggap Dari Aktivis
Korban Peretasan:



Pendaftaran: bit.ly/RembugNasional



Rabu, 08 Juli 2020
09.00-12.00 WIB



ZOOM
Youtube
(Persyarikat)

<sonnyzulhuda.com>

LINIMASA

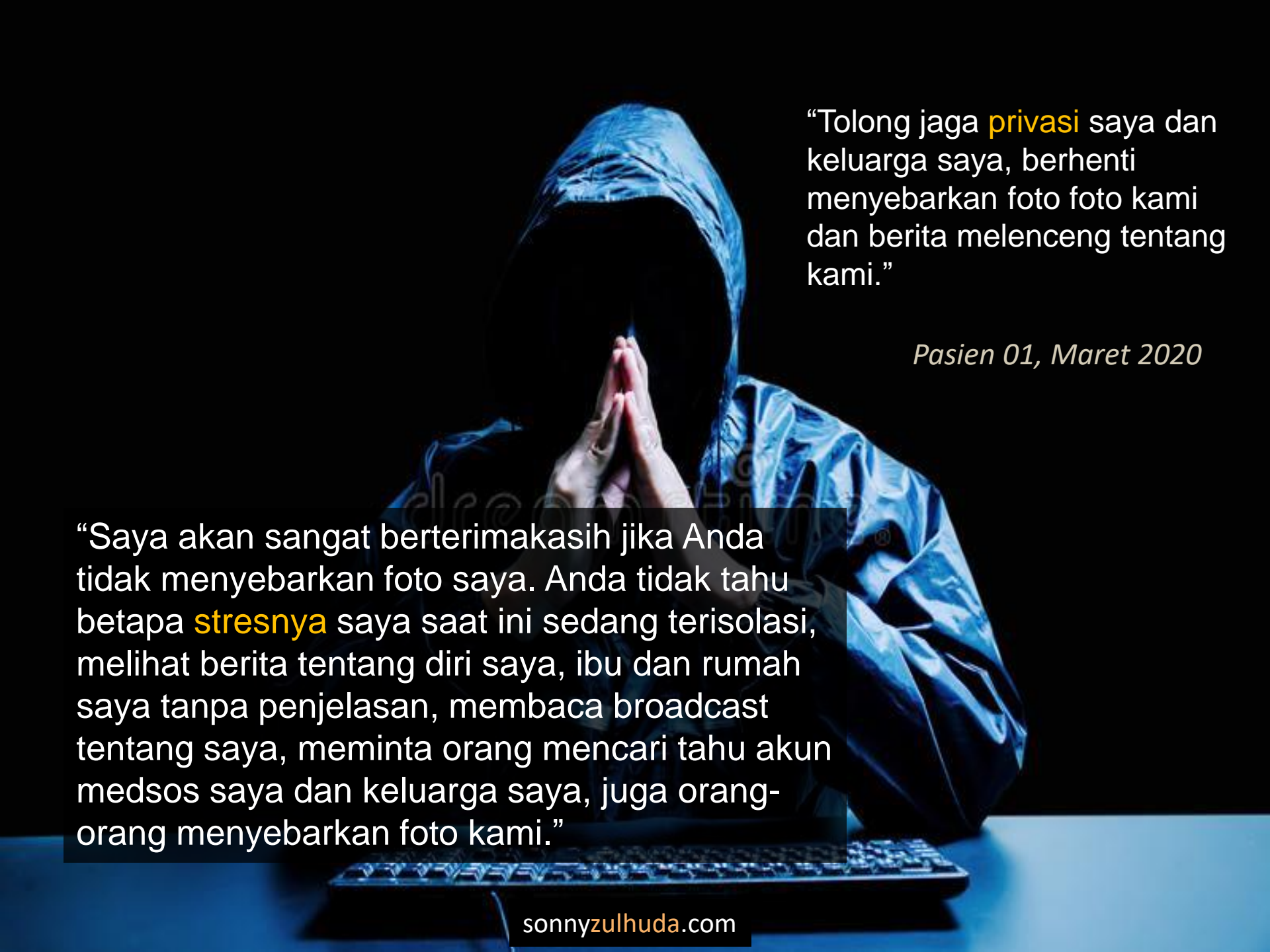
UU PDP di
Indonesia

Aspek &
Mekanisme
perlindungan

Privasi di Era
Informasi dan
Big Data

Privasi dan
Data Pribadi





“Tolong jaga **privasi** saya dan keluarga saya, berhenti menyebarkan foto kami dan berita melenceng tentang kami.”

Pasien 01, Maret 2020

“Saya akan sangat berterimakasih jika Anda tidak menyebarkan foto saya. Anda tidak tahu betapa **stresnya** saya saat ini sedang terisolasi, melihat berita tentang diri saya, ibu dan rumah saya tanpa penjelasan, membaca broadcast tentang saya, meminta orang mencari tahu akun medsos saya dan keluarga saya, juga orang-orang menyebarkan foto kami.”

PRIVACY IS ABOUT SELF-BEING, SELF-BECOMING AND SELF-CONTROL

“Thenceforth, solitude became dear to him (PBUH) and he used to seclude himself in the cave of Hira’, where he would engage in *tahannuth* before returning to his family and getting provisions again for this purpose.”
(Narrated by Muslim)

“Three elements of Privacy:
Anonymity, Solitude and Secrecy”
(Ruth Gavison, 1980)

“CLOSED DOOR” LESSON IN ISLAM...

<sonnyzulhuda.com>



“Three Times of Privacy” Rule (Q.S. 24: 58)
Inviolability of Private Homes (Q.S. 24: 27)
Non-surveillance Rule (Q.S. 49: 12)

Beberapa Dimensi Hak Privasi

1. Hidup bebas dari pemantauan orang lain (termasuk di tempat kerja, di tempat umum, oleh majikan, korporasi ataupun oleh negara)
2. Menikmati hidup yang berkualitas tanpa gangguan
3. Hak untuk menikmati kerahasiaan diri, menentukan penyebaran atau penyimpanan data pribadi, dan mengeksploitasi data pribadi.



Hak Privasi dan Kebebasan Sipil

- Hubungan multidimensional antara Hak atas Privasi dan kebebasan bersuara:
 - Hubungan limitatif (One's free speech is limited by other's privacy)
 - Hubungan kausalitas (One cannot exercise free speech without ability to choose what remains private away from control or surveillance)
- Keputusan Mahkamah Agung di Amerika Serikat dalam kasus *Riley v California*, S.Ct 2014.
- Keputusan Mahkamah Federal di Malaysia dalam kasus *Sivarasa Rasiah v Badan Peguam Malaysia & Anor* [2010].

Hak atas Privasi = HAM

- “Setiap orang berhak atas **perlindungan diri pribadi**, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945
- **Article 12 UDHR:**
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his **privacy**, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.
- Diadopsi dalam **Article 17 ICPPR**
- Di India dan Malaysia: sebagai perpanjangan dari **hak untuk hidup (right to life)**

4 Hal yang Mengancam Privasi

Power &
Control

- Big Brother

Wealth &
Greed

- Big Data Aggregators

Vested
Interests

- Fans
- Friends

Malice

- Criminals
- Fraudster

“Zero Privacy in the Internet”?

- Internet dibangun oleh para peniaga, dan dikontrol oleh para penguasa (the two BIGs) – Timothy Garton Ash, “Free Speech – Ten Principles for A Connected World” (2016)
- Ketika privasi dipinggirkan, dikerdilkan dan dilupakan.
 - Hilangnya self-respect
 - Kehidupan diawasi
 - Gerak-gerik dibatasi
 - Arus informasi dikontrol
 - Komunikasi disadap
 - Sistem informasi diretas
 - Data pribadi ditelusuri
 - Aib dan kesalahan dicari-cari

Mislocated CCTV can be privacy-intrusive!

Lew Cher Phow v Pua Yong Yong [2011] H.C. Johor Bahru



Taking patient's pics without consent

<sonnyzulhuda.com>

Lee Ewe Poh v Dr Lim Teik Man [2011] - High Court Penang

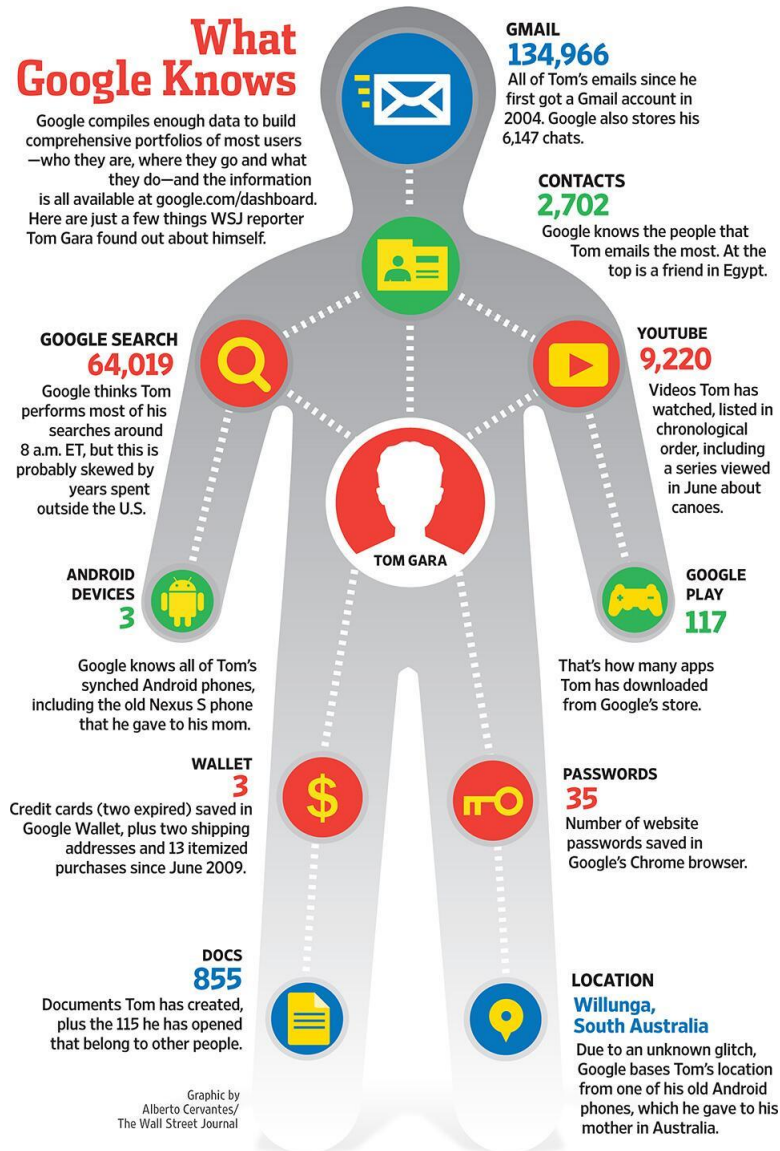


PENANG: Privacy breach is actionable. Court said that the privacy right of a female in relation to her **modesty, decency and dignity** in the context of the high moral value is her fundamental right.



What Google Knows

Google compiles enough data to build comprehensive portfolios of most users—who they are, where they go and what they do—and the information is all available at google.com/dashboard. Here are just a few things WSJ reporter Tom Gara found out about himself.



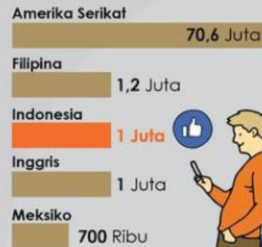
Graphic by
Alberto Cervantes/
The Wall Street Journal

<sonnyzulhuda.com>



KEBOCORAN DATA PENGGUNA facebook INDONESIA

DATA PENGGUNA BOCOR



Total
87
Juta

PENGGUNA FACEBOOK TERBESAR



Total
2,17
Miliar



Sumber Data: Liputan6.com, We Are Social,
Ilustrasi: Freepik.com
Data: Edmundo Siregar
Grafis: Irie yas

ANCAMAN KEMKOMINFO

Sanksi
Administrasi

Hukuman
Badan 12 Tahun

Denda
Rp 12 Miliar

Pemblokiran

@liputan6dotcom Liputan6online

Satu juta data pengguna Facebook di Indonesia bocor dan diduga disalahgunakan oleh Cambridge Analytica.

REPUBLIKA - 20/03/2018

Gaduh Data Facebook

SONNY ZULHUDA

Dosen Cyberlaw di International Islamic University Malaysia, Peneliti Islamic Economics Forum for Indonesia's Development (ISEFID)

Berita terungkapnya penggunaan data 50 juta pengguna Facebook di Amerika Serikat (AS) menambah panjang daftar keresahan dan keluhan masyarakat internasional terhadap media sosial yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg itu.

Terungkap, data tersebut digunakan kontan pemilu Cambridge Analytica di AS untuk menganalisis pola dan kecenderungan warga calon pemilih di Pemilu AS. Perusahaan ini juga dianggap menyusutkan kemenangan Donald Trump pada Pemilu 2016 itu.

Walaupun sempat terkejut konsultan pemilu sudah sering kita dengar, kali ini kita mendapatkan fakta gamblang bagaimana analisis *big data* dilakukan terhadap jutaan calon pemilih dengan tujuan melakukan penetatan pemilih serta penyebaran propaganda peserta pemilu secara langsung ke sasaran.

Gambaran mudahnya, jika dalam pilkada daerah X diketahui sejumlah besar warga pemilih dalam di wilayah itu menyukai sepak bola, maka sang konsultan akan mengemas iklan atau cabut sebagai seorang yang gear sepak bola untuk bahan kampanyenya.

Yang menjadi kekhawatiran dan kegaduhan adalah *data analytics* tersebut dilakukan berdasarkan data pribadi pengguna media sosial yang sebelumnya tidak pernah diberitahu bahwa datanya akan dipakai untuk keperluan komersial oleh konsultan pemilu itu.

Dalam konteks etika dan hukum, hal ini bisa dianggap *breach of confidence* atau *reach of privacy*, semacam pelanggaran atas privasi dan kerahasiaan yang bisa mengakibatkan kesalahan etika dan bahkan pidana.

Apalagi, kita tahu data pribadi kita di Facebook bisa sangat menyehuruk. Mulai dari identitas (nama, tanggal lahir, nomor KTP/

pendidikan, pekerjaan, karier); data geografis (tempat tinggal, perjalanan, komunikasi); biologis (gambar wajah dan anatomi tubuh yang memaparkan tinggi dan berat badan, wana kulit, rambut, dan mata); sampai data lainnya, seperti preferensi, anggota keluarga, pilihan politik, pertemanan, dan lain-lain.

Data kita di media sosial seperti Facebook memang sejatinya diberikan berdasarkan persetujuan pengguna sendiri.

Namun, karena Facebook utamanya bertujuan "hanya" untuk pertemanan sosial maka penggunaan data untuk keperluan yang tidak sejalan dengan dunia pertemanan sosial itu bisa dianggap menyalah rambu-rambu etika dan hukum terkait perlindungan data pribadi.

Dalam Peraturan Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa maupun APEC Privacy Framework, salah satu prinsip dasar penggunaan data adalah pengumpulan dan penggunaan yang didahului dengan persetujuan individu.

Persetujuan itu diberikan untuk keperluan dan tujuan spesifik serta eksplisit. Selain itu diperlukan transparansi melalui mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kebijakan privasi data.

Meski sangat terbatas, sebagian norma tersebut diadopsi di Indonesia melalui Pasal 26 UU ITE dan turunannya termasuk PP Nomor 82 Tahun 2012 serta Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Bagaimana dengan insiden Facebook baru-baru ini? Setidaknya ada beberapa aspek perlindungan data yang terindikasi dilanggar Facebook. Pertama, data pengguna dipakai tidak sesuai tujuan asas pengumpulan data, yaitu sebagai media komunikasi sosial dan pertemanan.

Kedua, data tersebut diungkap (di-*sharing*) ke pihak ketiga yang identitasnya tidak diketahui sebelumnya oleh pengguna Facebook.

Ketiga, pengguna tidak diberi pemahaman yang cukup tentang potensi eksploitasi data kepada pihak ketiga (termasuk penyedia aplikasi).

Keempat, Facebook tidak segera memberitahukan pengguna tentang adanya indikasi kegagalan pengamanan data, biasa disebut *breach notification duty*.

mengakui kesalahan yang dilakukan Facebook dalam wawancaranya dengan CNN baru-baru ini. Mereka juga mengakui tidak bisa menyalahkan pengguna Facebook atas alasan "persetujuan" yang diberikan secara tidak langsung.

Zuckerberg mengakui insiden ini mendai kepercayaan konsumen Facebook. Sebagai buah pernyataan yang baik, tapi tidak dapat menutupi permasalahan utama, yakni eksploitasi data pribadi yang tidak diingini. *Damage is done*.

Bukan tidak mungkin insiden ini menimbulkan masalah yang sama dapat terjadi di Indonesia, mengingat gencarnya dunia bisnis dan politik akhir-akhir ini. *Big data analytics* di Indonesia sangat menjanjikan seiring dengan ledakan informasi di internet.

Untuk mengantisipasi ini, Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keprihatinannya. Statistik tahun 2016 menunjukkan ada 76 juta pengguna Facebook di Indonesia yang merupakan negara keempat terbesar.

Tidak heran Facebook memiliki kantor resmi sebagai badan usaha tetap (BUT) di Indonesia sejak 2017. Maka, pemerintah perlu segera meminta Facebook menjelaskan potensi insiden serupa di Indonesia, sekaligus meminta kepastian adanya pengamanan data pribadi pengguna Facebook Indonesia sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Jika ada indikasi pelanggaran maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat untuk perlindungan konsumen dan penegakan hukum. Pengguna Facebook harus diberikan jalur yang mudah untuk mengeskan dan mengesasi kebijakan (*privacy policy*) dan praktik penggunaan data baik oleh Facebook maupun oleh pihak ketiga.

Bagi perusahaan konsultan data di Indonesia, insiden ini sebagai peringatan agar tidak meremehkan hak privasi individu. Eksploitasi data pribadi oleh konsultan pemilu perusahaan periklanan, *direct marketing* dan instansi pemerintah sekalipun, hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan norma etika yang berlaku.

Terakhir, bagi kita semua para pengguna Facebook, insiden ini merupakan peringatan bahwa data pribadi kita adalah aset pribadi dan agar tidak mengumbar data yang terkait. Media sosial pertemanan harus ditempatkan secara proporsional, jangan lagi dianggap

Lindungi Data Pribadi!

<sonnyzulhuda.com>

JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu segera membuat regulasi perlindungan data pribadi setelah kasus jual beli data nasabah masih marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendapatkan edukasi terkait dengan data privasi ini.

Juli 2014 Menteri, Agnes Tiana Damayanti,
& Andy Winarto
redaksi@winarto.com

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti di bank, data pribadi tidak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.

Namun, dia tidak menampik masih terdapat kelemahan dari sisi praktiknya terutama dari kesadaran masyarakat yang masih rendah dan ketiadaan regulasi yang kuat dan tegas.

Ragi Heru, masyarakat perlu terus diberikan edukasi dengan baik terkait dengan pemberian data pribadi terutama pada era digital ini. Selain itu, dia menekankan pentingnya definisi dan kategorisasi data pribadi utama seperti sidik jari, iris mata dan lainnya, yang harus dilindungi oleh hukum.

Dia menilai praktik pengumpulan data oleh beberapa bank untuk layanan tertentu harus diperketat.

"Saya pikir ini juga bukan tanpa Kominfo saja melainkan dari perbankan juga harus tegas, tidak boleh menjual data seperti ini atau disampaikan ke yang lain. Perlu diberi edukasi dan diberi ketegasan," ujar Heru.

Di sisi lain, data YLKI memperlihatkan aduan masyarakat terkait dengan penawaran produk perbankan lewat saluran telepon memenuhi peringkat teratas, diikuti permasalahan pembobolan rekening.

Sulani, Ketua Bidang Hukum dan Pengawasan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan pada era digital seperti sekarang, konsumen sangat mudah melakukan transaksi. Namun, faktor proteksi masih menjadi kekhawatiran bersama.

"Ketika konsumen memberikan data kepada perbankan atau marketing, sebenarnya sudah ada unsur kepercayaan di sana. Maka akan disediakan sekali jika data malah diperjual-belikan," tuturnya, Rabu (23/8).

Dalam catatan YLKI, aduan mengenai penawaran kartu kredit dan asuransi lewat telemarketing menempati posisi teratas, selanjutnya pemalsuan pembobolan rekening maupun transaksi fiktif.

Sulani mengusulkan, dengan tingginya aduan penawaran produk lewat saluran telepon, Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan mengenai penawaran produk finansial lewat telemarketing.

"Ada (pihak) marketing yang menawarkan kredit atau kartu kredit di bank 'A' ternyata produknya ada di bank 'B'. Padahal, lewat saluran telepon konsumen tidak berada pada posisi siap untuk diberi

pentawaran," katanya.

YLKI pun ikut menyemai praktik jual-beli data konsumen, yang belakangan aktivitas tersebut diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, yang telah menungkap jaringan penjualan data nasabah.

Tersangka pelaku menjual data nasabah melalui internet secara paket, mulai dari Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka mengampunikan data nasabah dari bagian pemasaran sejumlah bank sejak 2010.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Agung Setya, seperti dikutip dari ketetapan tertulis, Rabu (23/8), menyebutkan tersangka mulai mengklankan penjualan data nasabah sejak 2014 melalui beberapa situs internet, akan Facebook dengan nama "Bang Haji Ahmad", dan akan pada situs penjualan online.

Tersangka menjual harga bervariasi untuk paket data nomor telepon nasabah mulai dari Rp350.000 untuk 1.000 nomor nasabah hingga Rp1,1 juta untuk paket data berisi 100.000 nasabah.

TIDAK TOLERAN

Sementara itu, pun bankir menilai industri perbankan tidak menolerir adanya penjualan data nasabah.

Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Randi Anto menyebutkan manajemen punya code of conduct yang dapat mencegah terjadinya pencurian data ataupun penggunaan data yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sistem pengawasan akan menungkap sendainya ada pekerja yang melanggar

Sejumlah Aturan Mengenai Perlindungan Data Nasabah/Konsumen

1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kependidikan
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor M/MI/DK/SP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SE/OJK/07/2014 Tahun 2014 Tentang Kesehatan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
5. POJK Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor M/1/PP/02/014 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PP/02/05 Tahun 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Pengumpulan Data Pribadi Nasabah
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PP/02/2000 tentang Pemisahan dan Tata Cara Pembelian Perintah atau lain Tertentu Membuka Rekening Bank
9. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*
10. Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi*

* tidak sepenuhnya berlaku secara hukum

Perkembangan Jumlah Kartu Kredit dan Nominal Transaksi Periode Juli 2013 - Juli 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kartu (per juta kartu)	14,76	15,55	16,65	16,99	16,25
Nominal NAB (Rp. triliun)	1276,6	1423,5	1618,2	1612,6	1709,9

Sumber: Bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat

PERKEMBANGAN NAB

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Santoso Liem menegaskan pemersu pun akan bertindak sangat tegas terkait dengan adanya oknum nakal yang berani melakukan jual-beli data nasabah.

Santoso menyatakan proses penjualan kartu kredit, baik melalui telemarketing dan direct marketing, memiliki standar operasional dan ketentuan baku dengan

sistem pengawasan yang ketat dari manajemen.

Adapun, General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Mantha mengatakan pihaknya masih mendalami lebih lanjut kasus tersebut. Namun, pada intinya aksi jual beli data ini tidak dibenarkan. (Surya Mantha/Bundha (retrieved))

Potensi Eksploitasi Data Pribadi

- Pendaftaran no HP dan Medsos mahasiswa
- Pemanfaatan data kependudukan
- Penyalahgunaan data KTP-el
- Penggunaan data pemilih
- Pemberian akses data kependudukan ke sektor swasta
- Penggunaan data untuk penyidikan dan penyelidikan kepolisian

[Home](#) > [News](#) > [Pendidikan](#)

Menristekdikti: Semua Kampus Harus Mendata No HP dan Medsos

Rabu 06 Jun 2018 15:53 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Esthi Maharani

Menristekdikti Mohammad Nasir.

Foto: Antara/Adiwinata Solihin

Pendataan tersebut diberlakukan untuk semua kampus tanpa terkecuali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir telah meminta kepada rektor untuk mulai



Jadwal
Shalat

Wednesday, 08 Jul 2020
09:40:23

JAKARTA ▼

republika.co.id

◀ **ZHUHUR** ▶

11:52

EMBED <iframe src="https://www.republika.co.id/jadwal/s

TERPOPULER

[BERANDA](#) [SOROT](#) [NASIONAL](#) [NUSANTARA](#) [CEK FAKTA](#) [GALERI](#) [CERITA KHAS](#) [SIARAN PERS](#) [ENGLISH](#) [LAWAN COVID-19](#) [GPR NEWS](#)[bud-Kemenparekraf Soal Protokol Covid-19 Kebudayaan](#)[New Normal, PELNI Catat Jumlah Penumpang Mulai Meningkat](#)[Ini Lima Provinsi](#)[Berita Terkini](#)

Data Dukcapil Diakses 3,3 Miliar Kali

Senin, 30 September 2019 | 09:40 WIB | Penulis **Eko Budiono**, Redaktur **Gusti Andry**

Jakarta, InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan 3,3 miliar kali data milik Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) diakses untuk verifikasi.

"Untuk bantuan sosial, untuk pemberian beasiswa, untuk penanganan di BPJS, untuk membuka rekening Bank,

BERITA TERPOPULER



PUPR: Alokasi Anggaran Program BSPS di Jabar Capai Rp243,28 Miliar

Senin, 6 Juli 2020 | 10:19 WIB | Oleh Tri Antoro



Dinkes Bojonegoro Imbau Warga Waspada Serangan DBD

Senin, 6 Juli 2020 | 10:53 WIB | Oleh MC KAB

BOJONEGORO

- E-commerce Portal Leak
- Airline personal data
- Medical and Hospital patients' data
- P2P Lending Fintech





RESEARCH REPORT – Several studies have demonstrated that the use of a computer-based system for patient assessment and management can improve patient care. The use of a computer-based system for patient assessment and management can improve patient care. The use of a computer-based system for patient assessment and management can improve patient care.

ENGL 1010000001

Pharmaceuticals are not the only products that have been found to be contaminated with toxic substances. In a study published in the *Journal of the American Medical Association*, researchers found that some of the most common over-the-counter painkillers, including aspirin, ibuprofen, and acetaminophen, contain trace amounts of lead, cadmium, and mercury. The researchers found that the levels of these metals were highest in the oldest and most widely used products. The study also found that the levels of these metals were highest in the products that were manufactured in the United States. The researchers concluded that the presence of these metals in over-the-counter painkillers is a potential health risk, and that consumers should be aware of this risk when using these products.


Data pribadi yang diproses/diakses tak hanya dimanfaatkan untuk pemasaran produk perusahaan, tetapi juga untuk dimanfaatkan untuk aspek lainnya.

Perbandingan Data Privasi Nasabah
 Ditinjau dari Jenis Data yang Tersedia

[illegible][illegible][illegible][illegible]

"The [new] program is a
 significant step in the
 development of the
 program," says the
 program manager.
 "The program is a
 significant step in the
 development of the
 program."

Wang, J. and Wang, Y. 2005. The impact of the 2004 Asian tsunami on the marine environment of the East China Sea. *Marine Pollution Bulletin*, 50: 103-110.



<sonnvzulhuda.com>



Situs jual
beli online



Penggunaan laman bernama cek ktp



Situs lowongan kerja



SMS ke nomor masyarakat



Pelaku spam lewat SMS dan menawarkan pinjaman tanpa jaminan, hanya kirim nomor KTP

Data Pribadi Dijual Bebas

Data pribadi di pasar bebas sudah terjual bebas. Permasalahannya, semua perusahaan yang memiliki data pribadi pengguna akan dijual bebas.

JAKARTA, KOMPAS — Informasi data pribadi di pasar bebas sudah terjual bebas. Permasalahannya, semua perusahaan yang memiliki data pribadi pengguna akan dijual bebas. Data pribadi yang dijual bebas meliputi nama, alamat, nomor telepon, email, dan data lainnya. Data pribadi yang dijual bebas ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pemasaran, penelitian, dan lain-lain. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi pengguna.

Keamanan Data Pribadi



Daftar Alimast Haragga Nama Ibu Kandung

Berikut ini daftar alimast haragga nama ibu kandung yang terdapat dalam data pribadi pengguna. Daftar ini berisi nama-nama ibu kandung yang terdapat dalam data pribadi pengguna, termasuk nama-nama yang terdapat dalam data pribadi pengguna yang telah meninggal dunia.

Jebol, Sistem Pengamanan KTP Elektronik

<sonnyzulhuda.com>

Liputan investigasi *Kompas* mengungkap peredaran dan jual beli blangko kartu tanda penduduk elektronik asli di pasaran.

JAKARTA, KOMPAS — Blangko KTP elektronik asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Padahal, sebagai dokumen negara, blangko KTP-el tidak boleh beredar di pasaran dan diperjualbelikan.

Tim liputan *Kompas* memperoleh blangko KTP-el asli di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat, dan salah satu penjual di platform e-dagang Tokopedia. Blangko tersebut identik dengan blangko resmi yang hanya dikeluarkan pemerintah. Hologram di blangko pun menyerupai hologram KTP-el asli.

Saat ditempelkan ke telepon pintar yang dilengkapi NFC (peranti komunikasi antardua perangkat), cip di semua blangko mengidentifikasi diri sebagai NXP, sama dengan cip di KTP-el asli.

Pengujian secara teknis yang dilakukan ahli cip Eko Fajar Nur Prasetyo mengidentifikasi

>> BACA JUGA DI KOMPAS.ID
klik.kompas.id/blangkotpel

bahwa satu blangko dan satu KTP-el yang diperoleh dari Pasar Pramuka Pojok serta satu blangko yang diperoleh dari Tokopedia memakai cip NXP.

Eko mengungkapkan, blangko yang diperoleh tim *Kompas* saat diuji mengidentifikasi diri sebagai cip NXP. Pengujian itu menggunakan mesin pembaca kartu (*card reader*).

"Sesuai hasil pengujian, cip itu mengaku sebagai NXP," kata Eko, yang kerap dihadirkan KPK sebagai saksi ahli cip dalam sidang korupsi KTP-el.

Menurut dia, ketiga blangko yang diuji 80 persen berfungsi normal. "Cip itu (di ketiga blangko KTP-el yang diuji) mau bicara dengan (*card reader*

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Teknologi KTP Elektronik



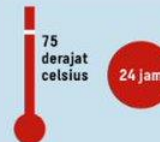
Bentuk KTP elektronik (KTP-el) sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit, yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.



Struktur KTP-el terdiri atas sembilan layar yang akan meningkatkan pengamanan dibandingkan KTP konvensional.

3.000 kali

Tahan terhadap pembengkokan hingga 3.000 kali.



Tahan suhu tinggi hingga 75 derajat celsius selama 24 jam.

KTP-el dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti:

- relief text
- microtext
- filter image
- invisible ink
- warna yang berpendar di bawah sinar ultraviolet
- anti-copy design.



Sanksi Pemalsuan KTP Elektronik



UU No 24 Tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96 dan 96A

Pasal 96:

Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikenai ancaman sanksi:

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Pasal 96A:

Setiap orang/ lembaga yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dikenai ancaman sanksi:

Kurungan penjara maksimal 10 tahun

Denda paling banyak Rp 1 miliar

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

sonnyzulhuda.com

Aspek Pengamanan Data



Akses dan Berbagi Data?



(over) the Auditor-General's Office (AGO) report on the troubled ac-

The firm gives a run-down of the most significant findings against

and Services (SBS) and notes, in bold letters, that FMS was "not

voice, verify their own work, and pay themselves, with little checks."

Good.

The WP also acknowledged laps-

in: enhang@spk.com.sg

<sonnyzulhuda.com>

Aspek Penghapusan Data

Is that your NAME, ADDRESS, PHONE NUMBER in the dump?

Firms throw out documents with personal data without shredding

Grace Chng
Senior Correspondent

Personal information is still being improperly collected, used and disposed of, even though there is a new law to protect personal data.

Security organisations—especially those in retail, healthcare and property—are under investigation following complaints that they used e-mail addresses and other personal information for marketing purposes or collected identity card and other personal details without prior consent.

It found guilty under the Personal Data Protection Act, which came into effect last July, they can be

Among other things, The Sunday Times found photocopies of passports, resumes of various professionals and details of commissions paid to property agents.

Most of the documents had the names and logos of local and foreign banks and other companies, and they included reports on industrial projects in Japan and Indonesia and project progress reports.

All were marked confidential or strictly confidential.

There were also printouts of e-mail with addresses, names and telephone numbers. The documents were dated from 2013 to this year.

Access to the rubbish bins was easy. One law-abiding man, who was seen sorting out the documents into neat piles, said he would sell them to recycling companies.

Corporate information does not come under the purview of the commission, which is concerned only with personal data protection.



PHOTOS COURTESY OF THE SUNDAY TIMES

A recent check in the Raffles Place area found that documents containing personal data are being thrown out in the trash in high-rise buildings there, with photocopies of passports, resumes of various professionals and details of commissions paid to property agents in the dump.

TIPS ON DATA PROTECTION

Personal data protection specialist Straits Interactive has conducted audits of 50 companies to check if they are ready to comply with the new Act.

It came up with this checklist after finding five common areas of weakness.

■ **DO** use a shredder or a document disposal service to dispose of documents containing personal data.

■ **DO NOT** throw away or recycle paper with personal data.

■ **DO** keep a personal info calendar.

■ **DO** put up reminders at copiers, fax machines or printers telling users to take all personal documents when they are done.

■ **DO NOT** leave behind passports, identity cards, resumes and other confidential information at these machines.

■ **DO** record and track who has access to keys to cabinets and drawers where confidential files are kept.

■ **DO NOT** leave keys hanging



Documents discarded without shredding. The Sunday Times found papers with professional and personal information in the trash.

sonnyzulhuda.com

Perlindungan Data = Penguatan Hak Sipil

Pengumpulan Data harus dengan izin pemiliknya dan tidak melawan hukum

Pastikan Data tsb akurat sehingga tidak mengelirukan

Pemilik data diberitahu tentang tujuan penggunaan data dan apa saja hak-haknya

Pemilik data diberikan pilihan dalam melaksanakan hak-haknya

Data pribadi tidak diakses/dibagi ke pihak ketiga tanpa izin

Data pribadi diberikan pengamanan sepatutnya

Data pribadi yang tidak lagi digunakan tidak boleh disimpan

Pemilik data berhak mengakses dan mengoreksi data

Aspek-aspek Utama Hukum Perlindungan Data



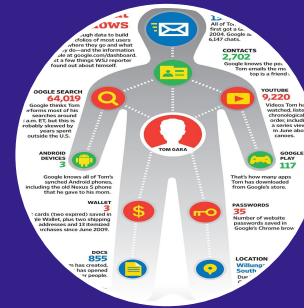
Penegertian dan Batasan

- Hak & Kewajiban
- Hal-hal yang dilarang



Subyek Hukum

- Subyek data
- Pengguna data



Data life-cycle

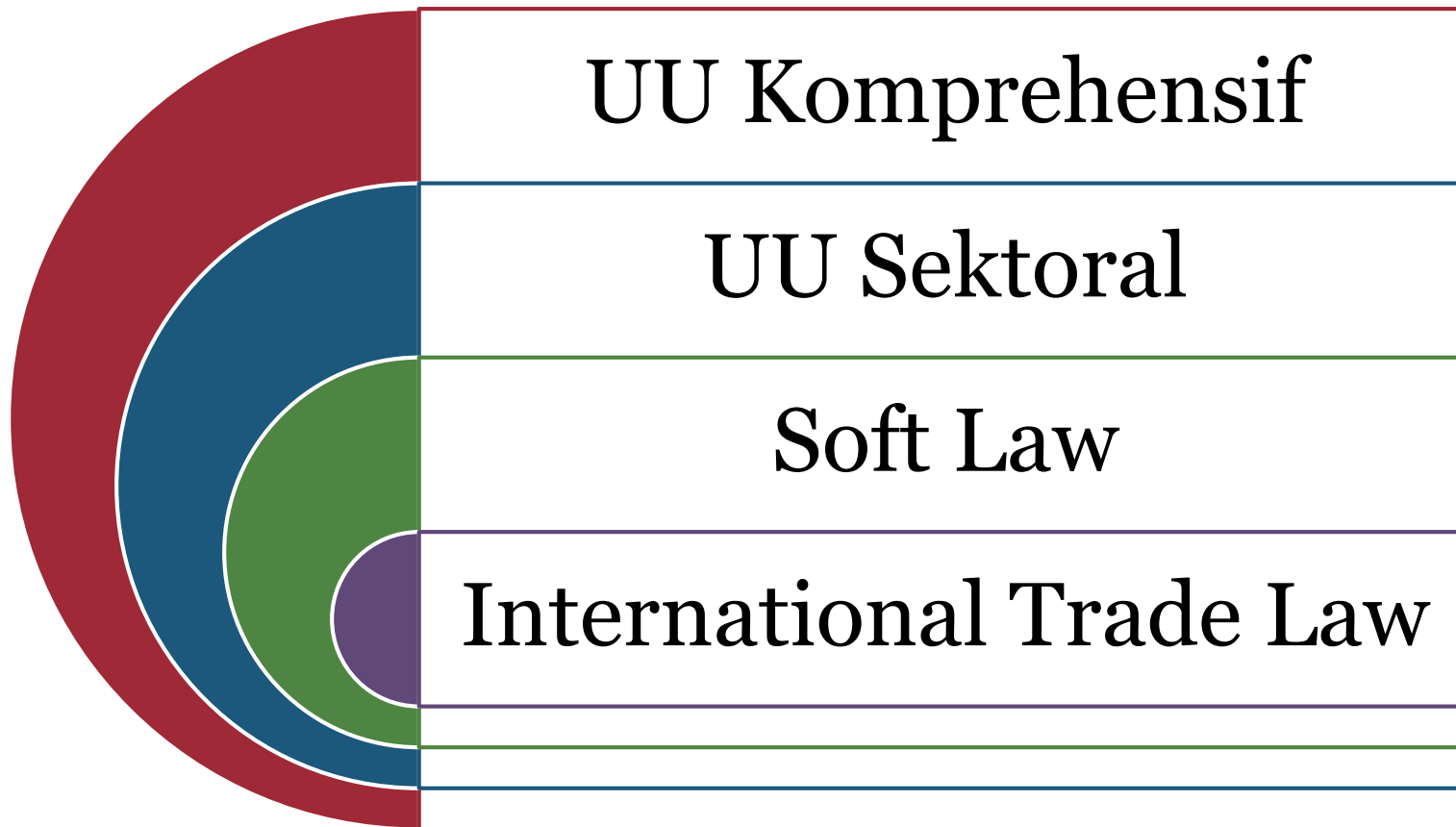
- Pengumpulan
- Penyimpanan
- Penggunaan



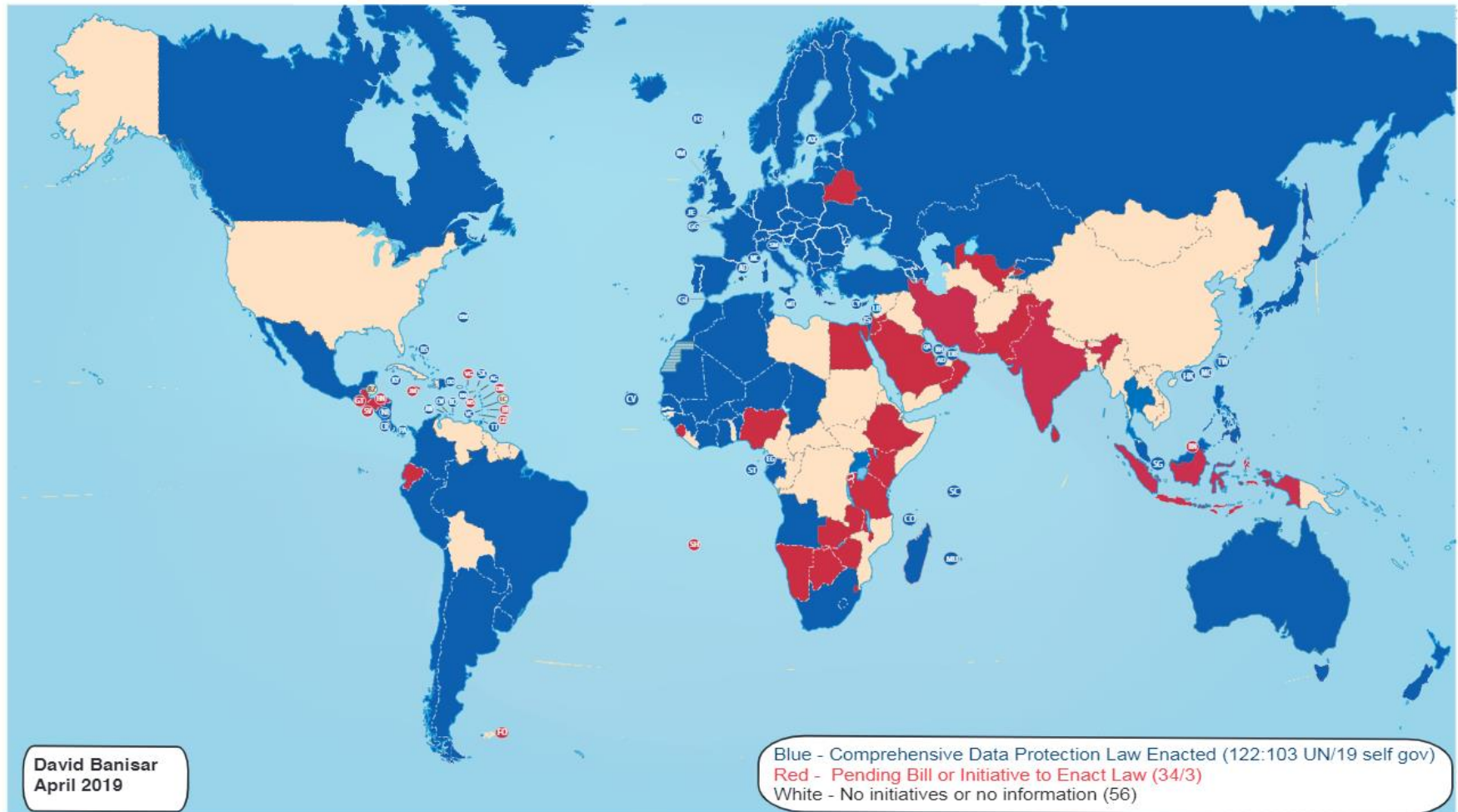
Pertanggungjawab an

- Perdata
- Pidana

Lex Specialis: Hukum Perlindungan Data?



National Comprehensive Data Protection/Privacy Laws and Bills 2019



G-20: Osaka Track on Data Free Flow with Trust (DFFT)



APEC Privacy Framework 2015

- APEC member economies realize the enormous potential of the digital economy...
- Agrees on **framework to protect privacy** within and beyond economies and to enable regional transfers of personal information benefits consumers, businesses, and governments.
- Recognizes the importance of the development of **effective privacy protections that avoid barriers to information flows** and ensure continued trade and economic growth in the APEC region.

European General Data Protection Regulation 2016

Bigger Responsibility, Bigger Repercussions



UU PDP di Indonesia?

Various Data Protection Regulations in Indonesia

The regulations for protecting personal data in Indonesia can be found in **over 32 regulations from various sectors** (finance, health, population, telecommunications, energy etc.)

Personal data is generally regulated under **the Law No. 11/2008** ("UU-ITE"), and Government Regulation No 82/2012 ("PP PSTE") and **Ministerial Regulation No 20/2016** are implementing regulations of Article 26, UU ITE

The Government will make Indonesian Data Protection law that is **more comprehensive** in coverage and protection of personal data in Indonesia

Law No.10 of 1998
on Banking

Law No.36 of 1999 on
Telecommunications

Law No.8 of 1999
on Consumer
Protection

Law No.39 of 1999
on Human Rights

Law No.23 of 2006 on
Civil Administration

Law No.11 of 2008
on ITE

Law No.14 of 2008
on Public Info Disc.

Law No.24 of 2013 on
Civil Administration

Law No.36 of 2009
on Health

Law No.43 of 2009
on Archive

Law No. 3 of 1997 on
Child Justice

Law No.36 of 2009
on Health

GR No.82 of 2012
on PSTE

MR No. 20 of 2016 on
Personal Data
Protect*

GR No.67 of 2011
on Electronic ID

Menyongsong UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Membentuk
“new norm”
dalam
pemanfaatan
data pribadi di
Indonesia

Membatasi
eksploitasi
data oleh
pihak lain
termasuk
bisnis dan
pemerintah

Bersifat umum, cross-sectoral,
menjadi payung hukum dalam
kaitan perlindungan data pribadi
di segala sektor (swasta dan
pemerintahan)

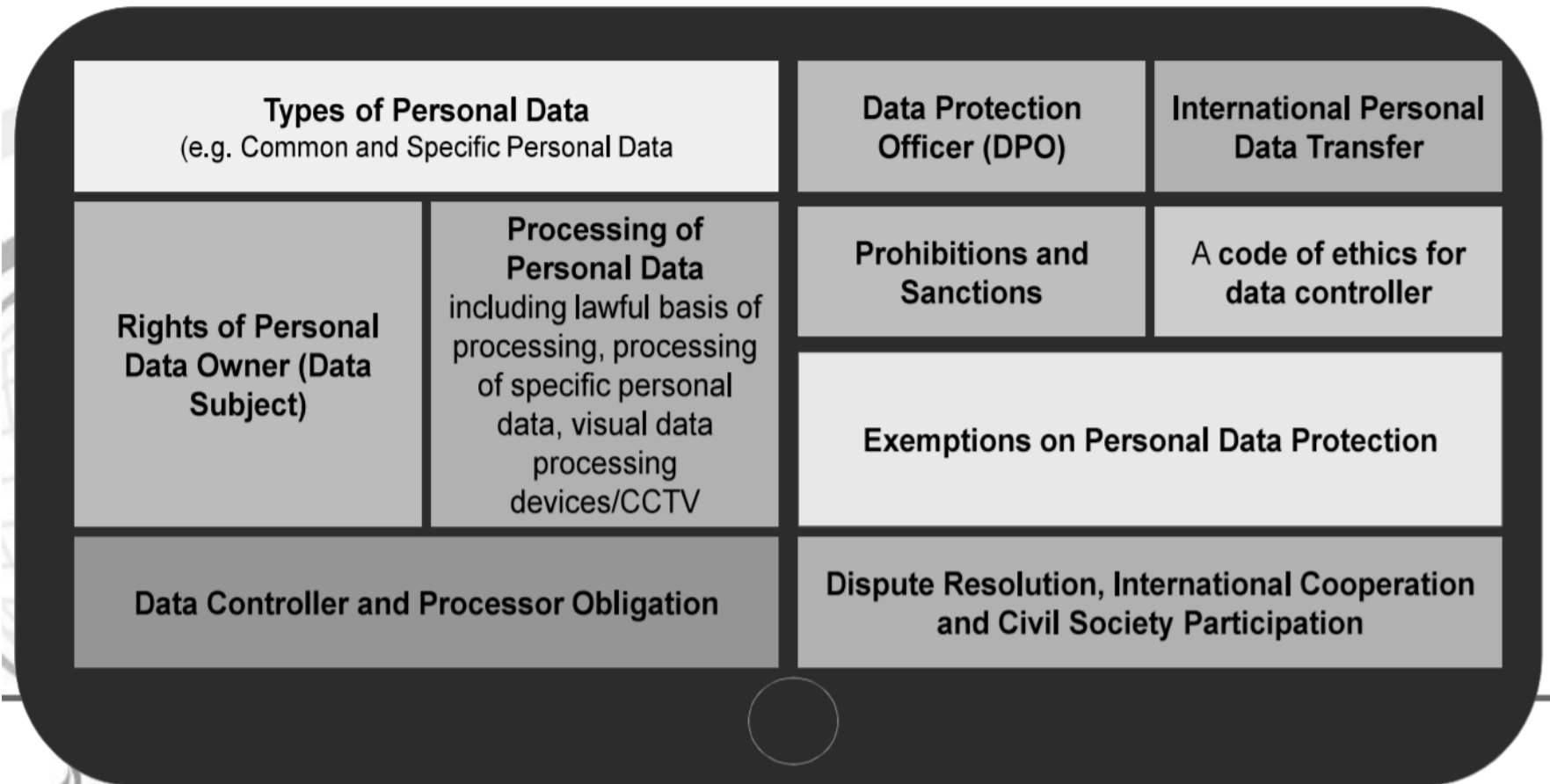
Memberikan
hak-hak
kepada
pemilik data
pribadi, yaitu
setiap warga
Indonesia

Menyiapkan
sanksi pidana
dan perdata
untuk setiap
pelanggaran

Menciptakan
kultur data
yang
transparan
dan
bertanggung
jawab

Menyiapkan
Indonesia
dalam
interaksi
global

Outline of Indonesian Data Protection Bill



Sumber: Diskusi bersama narasumber Kemkominfo (2019)

Catatan Penutup

1. Perlindungan Data Pribadi berakar pada perlunya melindungi hak-hak pribadi terkait **kualitas hidup umat manusia**. Dengan adanya perlindungan, maka diharapkan warga Indonesia dapat menikmati kebebasan sipil tanpa kekangan, pemantauan ataupun intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.
2. UU PDP sudah menjadi “new norm” akibat kemajuan teknologi dan tantangan globalisasi ekonomi. Sudah saatnya Indonesia memiliki **UU PDP yang komprehensif, tepat guna, berdaya guna** dan mengakomodasi kepentingan umat dan warga negara.
3. Bagi Muhammadiyah, **big data adalah sumber daya** bagi individu dan Persyarikatan. Maka perlindungan data menjadi satu lagi lahan penting *amar ma'ruf nahi munkar*, membela hak umat dari pihak-pihak yang mengeksploitasi data untuk kepentingan politik represif dan bisnis oligarkis. Perjalanan RUU PDP perlu dikawal bersama.



TERIMA KASIH

<sonnyzulhuda.com>

Feedback?

sonny@iium.edu.my

<http://sonnyzulhuda.com>